

DAMPAK DEPRESIASI RUPIAH TERHADAP PEREKONOMIAN JANGKA PANJANG

Sri Adiningsih

Abstract

Since July, 1997, a crisis in currency market has been running into Asian countries. These countries which were known as High Performance Asian Economic Countries (HPAEs) were suddenly knocked down by a prolonged crisis.

Speculators were clearly playing an important role in the crisis, particularly in the initial stage. The fragile of economic fundamental, over valued currency, however, were the explanatory factors. More over, we must analyses this crisis in a Regional-International perspective.

In Indonesia, the crisis has been becoming an economic even social crisis. Some empirical data proved this statement. In the globally dependent economy this crisis can be a serious problem. However, long term effects depend on the arranged policies and consistency of its implementation. The government has to reform financial market fundamentally by making some friendly market policies. It is needed urgently to make comprehensive improvement in all aspects, include real, finance and public sector gradually.

PERKEMBANGAN perekonomian dan pasar keuangan suatu negara pada perekonomian dunia yang semakin terintegrasi ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi dan keuangan global. Oleh karena itu krisis keuangan dan ekonomi Indonesia yang terjadi pada saat ini tidak dapat dilepaskan dari krisis keuangan maupun ekonomi regional maupun global. Demikian juga untuk melihat dampak krisis keuangan ini terhadap perekonomian Indonesia harus dilihat dari perspektif yang luas. Untuk melihat dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat ini perlu kita analisis dari penyebab timbulnya krisis pada perspektif regional.

Perkembangan pasar valuta asing (valas) di negara-negara ASEAN pada bulan terakhir ini membuat otoritas moneter di kawasan ini kelabakan, karena nilai mata uang lima negara di kawasan ini yang biasanya memiliki *performance* yang baik tahun-tahun terakhir ini dibuat tidak berdaya menghadapi pasar, dan membuat nilai

mata uang di lima negara ini terdepresiasi cukup besar. Bahkan Menteri Keuangan dan Perdana Menteri Thailand telah mengundurkan diri sehubungan dengan krisis keuangan yang telah menimpa negara Gajah Putih tersebut. Mengapa kekuatan pasar valas dapat mendepresiasi mata uang di kawasan ini, dan apa dampaknya pada perekonomian dalam jangka panjang?

KRONOLOGI KEJADIAN

Pada bulan Juli yang lalu telah terjadi krisis di pasar *currency* negara-negara ASEAN, yaitu: Thailand, Pilipina, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Pada bulan itu mata uang negara-negara tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Pada tanggal 2 Juli saja Bath Thailand turun 18% terhadap US\$, pada tanggal 11 Juli Peso Pilipina turun sebesar 10% terhadap US\$, Ringgit Malaysia turun sebesar 4,9% pada tanggal 14 Juli dan Rupiah Indonesia turun 5,9% pada tanggal 21 Juli 1997. Mata uang Singapura juga

terdepresiasi semakin cepat meski tidak sebesar penurunan mata uang negara-negara tetangganya.

Sebelum tanggal 21 Juli 1997 para analis masih memuji Indonesia sebagai model yang dapat dipakai sebagai panutan oleh negara sedang berkembang lainnya dalam mengelola mata uangnya (Business Week Asian Edition Juli 28 1997 dan Far Eastern Economic Review July 24, 1997). Mereka masih percaya bahwa otoritas moneter Indonesia akan mampu menahan gejolak pasar valas di kawasan ini, meski Malaysia saja (memiliki fundamental ekonomi lebih baik dari Indonesia) sudah menyerah pada pasar. Namun demikian aksi spekulasi akhirnya juga dapat menghantam pertahanan tersebut. Rupiah akhirnya turun nilainya sebesar 5,9% pada tanggal 21 Juli 1997, tepat seminggu setelah para spekulasi menyerbu ringgit Malaysia. Mulai saat itu krisis pasar valas dimulai di Indonesia yang berlanjut sampai sekarang. Untuk itu menarik kita pelajari mengapa hal itu bisa terjadi dan dampaknya dari sudut pandang ekonomi.

FUNDAMENTAL EKONOMI DAN DEPRESIASI

Jika di amati dengan seksama ada keterkaitan antara kondisi fundamental ekonomi di beberapa negara ASEAN dengan kemampuan pasar menggoyang mata uang masing-masing negara pada saat pasar diserang pada pertama kali. Fundamental ekonomi Thailand adalah yang terjelek di kawasan ini (lihat tabel 1), dan kebijakan kurs mata uangnya kurang *flexible*. Oleh karena itu serbuan pasar membuat penurunan mata uang Bath terbesar di kawasan ASEAN. Diikuti oleh Pilipina yang juga memiliki fundamental ekonomi kurang baik meski lebih baik dari Thailand. Hal yang menarik untuk diamati adalah *sequence* serangan para spekulasi di kawasan ini. Seharusnya spekulasi menggoyang pasar Indonesia setelah Pilipina, mengingat fundamental ekonomi Malaysia lebih baik dari Indonesia. Namun para spekulasi justru menggoyang pasar

uang Malaysia dulu. Ada kemungkinan ini terjadi karena manajemen kurs kita yang *predictable* membuat minat spekulasi masuk ke Indonesia menjadi berkurang. Meski demikian dampak dari serangan spekulasi tersebut lebih besar di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Penurunan mata uang rupiah pada hari "h" nya lebih besar dibandingkan dengan penurunan ringgit. Negara seperti Singapura yang memiliki fundamental ekonomi yang terbaik di kawasan inipun tidak dapat menghindari dari serbuan para spekulasi, meski dampaknya tidak sebesar negara-negara tetangganya.

Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa kemampuan para spekulasi di pasar uang untuk menggoyang mata uang suatu negara dibatasi oleh kondisi fundamental ekonomi negara tersebut pada saat serangan awal dilancarkan.

Negara yang memiliki fundamental ekonomi yang semakin baik memiliki daya tahan terhadap serangan spekulasi yang semakin tinggi. Dari kejadian bulan Juli tersebut ditunjukkan oleh kemampuan Singapura, Malaysia dan Indonesia yang lebih dapat menahan serangan spekulasi dibandingkan dengan negara seperti Thailand dan Pilipina. Meskipun perkembangan terakhir menunjukkan faktor non ekonomi yang kurang menguntungkan ikut memperburuk situasi.

NILAI VALAS MENYIMPANG DARI NILAI EKSPEKTASINYA?

Negara-negara kawasan ASEAN yang menghadapi krisis *currency* tersebut pada umumnya mengalami *overvalue* mata uangnya saat itu. Jika ekspektasi depresiasi dihitung dengan menggunakan perbedaan inflasi dua negara, dalam hal ini perbedaan inflasi negara tersebut dengan US, maka mata uang negara-negara tersebut semuanya *overvalue* terhadap US\$ selama enam tahun terakhir ini. Besarnya perbedaan ekspektasi depresiasi (apresiasi aktual) dan depresiasi aktual (ekspektasi apresiasi) di kawasan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.
Indikator Ekonomi Beberapa Negara ASEAN Bulan Juni 1997

	INDONESIA	MALAYSIA	SINGAPURA	PHILIPINA	THAILAND
Ec. Growth 1996 1997	7,5 8,0	8,5 8,0	6,2 7,0	5,4 5,5	6,1 6,6
Int. Reserve Latest Year Earlier	19,01b(Mar) 14,95b	26,13b(Feb) 23,06b	77,22b(Feb) 70,54b	10,30b(Feb) 6,96b	36,33b (Apr) 37,82b
Trade Balance Latest3mont Prev.3month Year Earlier	+1,78b*(Jan-Mar) +2,97b +1,86b	-0,17b(Okt-Des) +0,25b -0,38b	-1,91b(Dec-Feb) -1,29b -2,51b	-2,88b(Jan-Mar) -2,64b -2,65b	-3,14b(Okt-Des) -4,09b -3,86b
Exports Latest3mont %ΔPrev.3m %ΔYear Earlier	12,36b* -8,8 +10,3	20,04b +0,7 +0,8	29,66b -7,6 +0,0	5,51b -2,0 -17,6	13,97b +1,2 -5,8
Imports Latest3mont %ΔPrev.3m %ΔYear Earlier	10,58b* -0,1 +13,2	20,21b +2,9 -0,3	31,57b -5,4 -1,9	8,39b +1,6 +14,4	17,11b -4,4 -8,5
Current Acc.	-7,8 (Q3)	-4,4 (1996)	+14,1(Q4)	-2,0 (Q4 95)	-12,2(Q4)
Cons. Prices Base Latest3mav Inf. prev3m Inf. 1year	4.88- 3.89=100 194,2(Mar-Mei) +1,4 +5,2	1994=100 108,5(Nov-Jan) +0,9 +3,3	10.92-9.93=100 108,0(Dec-Feb) +0,7 +1,9	1988=100 236,0(Mar-May) +1,4 +4,5	1990=100 136,4(Nov-Jan) +0,9 +4,6
Money Supply Latest %ΔPrev.Mt %ΔY.Earlier	Rps 299,28t(Apr) +1,6 +25,3	M\$249,7b(Jan) +3,4 +21,4	S\$113,66b(Feb) +0,5 +10,6	P825,29^(Nov) + 2,3 +16,7	Bath 3.721,0b(Jan) -0,5 +10,8

*Termasuk Petroleum

^ M3

Sumber : *Far Eastern Economic Review dan Economist* , Juni 1997

Secara teoritis besar kecilnya kemampuan spekulasi menggoyang uang sesuatu negara dibatasi oleh besarnya perbedaan nilai uang ekspektasi dan aktual. Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa mata uang negara-negara ASEAN pada umumnya *overvalue* sekitar 11-68% pada periode pengamatan. Pada hari "h" nya pasar dapat menurunkan nilai mata uang sekitar 4-18%. Dari kedua informasi tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan pasar menggoncang mata uang suatu negara pada umumnya dipengaruhi oleh besarnya deviasi mata uang masing-masing terhadap nilai ekspektasinya. Negara seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki fundamental ekonomi (dilihat dari indikator ekonomi makro) yang lebih baik dari Thailand, oleh karena itu kemampuan spekulasi untuk menggoncang mata uang negara-negara ini lebih kecil dari koreksi yang sebenarnya diperlukan pada awal goncangan mata uang negara-negara ini. Namun, negara seperti Thailand yang memiliki fundamental ekonomi lemah pada saat itu dapat menjadi bulan-bulanan spekulasi, karena pasar dapat memaksa bath di turunkan lebih dari yang diperlukan.

Oleh karena itu kebijakan untuk mempertahankan nilai uang yang *overvalue* hanya akan memberikan kesempatan pada spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan kekuatan pasar untuk mengoreksi nilai uang tersebut. Ini adalah harga yang harus dibayar

karena dibukanya pasar. Pasar akan mendisiplinkan distorsi harga dengan kekuatan pasarnya. Oleh karena itu perlu disadari bahwa konsekuensi dibukanya pasar suatu negara selain memberikan manfaat juga membawa beberapa dampak yang tidak diinginkan. Proses konvergensi dan mekanisme pasar akan mampu mendisiplinkan distorsi pasar, konsekuensi ini yang nampaknya belum kita sadari dengan baik.

NATURE BISNIS DI PASAR VALAS

Dalam era liberalisasi seperti sekarang ini resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan terhadap perubahan nilai mata uang semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya aset dan kewajiban yang diterbitkan dalam mata uang asing, dan juga meningkatnya permintaan mata uang asing untuk memperlancar perdagangan internasional. Meningkatnya *net exposure* terhadap mata uang asing yang terdiri dari *net foreign asset* dan *net foreign exchange buying*, baik oleh pemerintah maupun swasta, akan menempatkan nilai uang negara tersebut menjadi semakin *volatile*, jika tidak dikelola dengan benar (Saunders, 1994).

Oleh karena itu *mismatching foreign exchange* di negara yang menggunakan regim mata uang yang fleksibel lebih beresiko dibandingkan dengan regim *pegged* atau *managed float*. Namun demikian, dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa penentuan nilai uang

Tabel 2.
Besarnya Perbedaan Ekspektasi Depresiasi dan Aktual Depresiasi
di Negara-negara Kawasan Asean

NEGARA	PERIODE PENGAMATAN	DEPRESIASI EKSPEKTASI-AKTUAL
1. Indonesia	Des'90 - Maret'97	22 %
	Sept'86- Juni'97	36,7%
2. Malaysia	Des'90 - Maret'97	15,9%
3. Singapura	Des'90 - Apr'97	11,3%
4. Philipina	Des'90 - Apr'97	67,5 %
5. Thailand	Des'90 - Apr'97	12,5 %

Sumber : International Financial Statistic, IMF (diolah)

pada *pegged* dan *managed float* *regim* yang tidak realistis, juga tidak menjamin tidak adanya fluktuasi mata uang di negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen otoritas moneter dalam menentukan kurs mata uang menjadi semakin kompleks dan penting peranannya dalam manajemen ekonomi makro suatu negara dalam era liberalisasi ini.

Pasar valas beroperasi 24 jam dan *turn-over* nya bisa mencapai US\$ 1 triliun per hari pada saat ini. *The Bank of International Settlements* memperkirakan bahwa rata-rata volume perdagangan *Forex* perhari di dunia dapat mencapai US\$ 800 milyar pada tahun 1992 (Saunders, 1994). *Dealer* pada pasar ini sebagian besar dilakukan oleh bank-bank internasional yang besar dan para *specialist* yang melakukan *making market* pada *foreign exchange*. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa *forex* adalah *interbank over-the-counter market*. Ada 4 macam aktivitas perdagangan yang dilakukan di pasar *forex*, yaitu : untuk kepentingan langganan, untuk *hedging*, untuk ambil posisi dan untuk keperluan spekulasi.

Spekulan valas menggunakan semua informasi dan kemampuannya untuk mempredik nilai mata uang dan berusaha mendapatkan keuntungan darinya. Keuntungan para *dealer* di pasar ini sebagian besar diperoleh dari keuntungan spekulasi, oleh karena itu peranan spekulasi pada pasar valas perlu mendapatkan perhatian yang besar dari otoritas moneter suatu negara. Pelaku utama spekulasi di pasar valas adalah bagian *forex bank*. Spekulasi sebenarnya melakukan arbitrase *across time*, oleh karena itu keberadaan spekulator tersebut diperlukan karena dapat meningkatkan efisiensi pasar *forward*, *future* dan *option* *forex* dengan menjadikan pasar likuid (Fabozzi, Modigliani & Ferri, 1994). Meski demikian adanya *moral hazard problem* juga memungkinkan pemanfaatan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan karena adanya informasi yang tidak simetris di pasar.

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa peranan spekulator dalam pasar *forex* adalah penting. Pasar ini cukup besar volumenya sehingga perilaku para spekulator dapat mempengaruhi nilai mata uang suatu negara bila mereka melakukan transaksi yang cukup besar bagi perekonomian negara tersebut. Selain itu pasar ini dikelola oleh para profesional yang *well educated* dan *well trained*, sehingga permainan di pasar ini *sophisticated*. Oleh karena itu kebijakan *forex* suatu negara menjadi semakin kompleks dengan semakin liberalnya pasar keuangan suatu negara dan berkembangnya instrumen keuangan yang ada di pasar. Pada situasi seperti ini penentuan mata uang yang lebih realistis menjadi kebutuhan jika negara tersebut masih konsisten dengan liberalisasi ekonomi. Ini yang mengakibatkan otoritas moneter Indonesia akhirnya melepaskan *intervention band* rupiah dan membiarkan rupiah untuk *independently floating*.

DAMPAK KRISIS KEUANGAN TERHADAP MASYARAKAT

Krisis keuangan Indonesia yang mulai terjadi sejak bulan Juli yang lalu telah berkembang menjadi krisis ekonomi, yang dapat menjadi krisis sosial jika tidak segera ditangani dengan benar dan cepat. Krisis keuangan ternyata telah memberikan dampak yang cukup besar bukan saja pada kondisi perekonomian kita namun juga situasi sosial yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Keadaan ini diperparah dengan beberapa hal yang kurang menguntungkan, seperti bencana kekeringan dan kebakaran hutan membuat situasi menjadi lebih buruk. Beberapa peristiwa penting di daerah Yogyakarta dan sekitarnya dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur.

Dampak dari krisis tersebut secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu dari sisi dunia usaha sebagai produsen dan masyarakat umum sebagai konsumen. Ada indikasi bahwa

dunia usaha di daerah, bahkan di perdesaan sudah terkena dampak krisis ini. Turunnya produksi pengusaha akhirnya mengakibatkan turunnya kesempatan kerja masyarakat. Bahkan, pemutusan hubungan kerja, baik sementara maupun permanen, sudah mulai dilakukan. Sebagai gambaran beberapa usaha kecil di daerah Delanggu dan sekitarnya, Kotagede dan sekitarnya (pengrajin perak), Kasongan dan sekitarnya (pengrajin keramik) mulai menurunkan produksinya dan melakukan PHK. Penurunan aktifitas ekonomi tentunya akan mengurangi daya beli masyarakat terutama yang terkena dampak langsung dari penurunan aktifitas ekonomi tersebut. Situasi ini menjadi lebih sulit bagi mereka karena pada saat yang sama harga-harga kebutuhan pokok sudah mulai merayap.

Di Gunungkidul harga-harga kebutuhan pokok naik mencapai 50%. Situasi tersebut membuat sebagian masyarakat sudah mulai makan gaplek di Gunungkidul, pegadaian mulai diserbu nasabah (di Wonosobo dan Magelang), demikian juga aksi kejahatan di DIY meningkat. Menghadapi situasi tersebut mahasiswa mulai berdemonstrasi, di Jakarta pada tanggal 6 Oktober, di Yogyakarta 9 Oktober dan di Solo 10 Oktober 1997. Pada prinsipnya mahasiswa tersebut menuntut penurunan harga dan DPR agar lebih memihak pada rakyat. Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dampak krisis ekonomi pada saat ini bisa meluas menjadi krisis sosial yang dapat membahayakan kepentingan nasional kita jika ditangani kurang tepat dan lambat.

PROSPEK PEREKONOMIAN PASCA KRISIS

Dampak krisis ini terhadap perekonomian jangka panjang tergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah dan konsistensinya, terutama yang terkait dengan implementasi kebijakan. Apabila kebijakan yang diambil tidak tepat atau tidak/dan konsisten maka dapat diduga krisis ini akan berlanjut, namun kalau kebijakan yang diambil tepat dan konsisten krisis ini diharapkan dapat segera selesai dan perekonomian kita dapat balik dengan kondisi yang lebih sehat.

Perkembangan krisis terakhir mengindikasikan bahwa kebijakan yang sifatnya responsif kurang/ tidak efektif untuk mengatasi masalah. Selain itu pada pasar keuangan yang semakin liberal ini fluktuasi mata uang suatu negara akan menjadi hal yang rutin (ingat perkembangan nilai Yen dan US dollar) karena kemampuan suatu negara untuk membatasi pergerakan mata uangnya menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu krisis ini hanya dapat diatasi dengan suatu kebijakan yang sifatnya *back to basic* agar supaya kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan lagi.

Indonesia perlu membenahi pasar valas secara fundamental dengan kebijakan yang sifatnya *market friendly*. Penawaran valuta asing perlu ditingkatkan dengan menggali sumber valuta asing yang berjangka panjang dan sifatnya relatif stabil, seperti peningkatan ekspor dan menggalakkan *Foreign Direct Investment* (FDI). Permintaan valuta asing perlu diturunkan dengan jalan melakukan substitusi impor dan membatasi impor pemerintah yang kurang urgen. Untuk dapat menggalakkan ekspor, menurunkan impor maupun menarik FDI Indonesia perlu meningkatkan daya saing di pasar internasional. Selain itu, juga perlu meningkatkan daya tarik Indonesia pada investor baik domestik maupun internasional. Hal-hal tersebut sebenarnya bukan hanya perlu dilakukan untuk kepentingan mengatasi masalah pasar valas, namun juga diperlukan untuk mengantisipasi AFTA, APEC dan WTO. Oleh karena itu pembenahan ekonomi secara struktural untuk mengatasi masalah ini meskipun *costly* adalah perlu dilakukan.

Pembenahan ekonomi yang diperlukan bersifat menyeluruh, baik dari sisi sektor riil, keuangan maupun publik, namun secara bertahap. Pada sektor riil kita perlu mengembangkan struktur industri yang sehat (pengaturan pasar yang sehat) kecuali untuk komoditas strategis dapat dikecualikan, yang didukung oleh sektor keuangan dan publik yang sehat. Pembenahan sektor keuangan adalah yang paling *urgent* untuk dilakukan. Otoritas moneter perlu segera mengambil keputusan mengenai lembaga keuangan

yang bermasalah, jika merger atau akuisisi sudah tidak mungkin dilakukan likuidasi lembaga keuangan tidak dapat ditunda terus.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa *forbearance* (membiarkan lembaga keuangan yang seharusnya dilikuidasi hidup) lembaga keuangan adalah *costly*. Cepat atau lambat kita perlu melikuidasi mereka, dan ongkos likuidasi semakin lama akan semakin mahal. Oleh karena itu likuidasi 16 bank yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tanggal 1 November 1997 yang lalu merupakan titik awal dalam rangka restrukturisasi sektor keuangan kita. Setelah itu kebijakan kehati-hatian lembaga keuangan perlu lebih diperluas untuk mengurangi masalah *moral hazard problem* yang ternyata sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh regulasi kita.

Pada sektor publik kita perlu mengubah *attitude* birokrat agar lebih akomodatif dengan swasta (negara tetangga kita punya Malaysia Incorporated dan Singapura Incorporated untuk meningkatkan kemitraan swasta dan pemerintah), sehingga konsep kemitraan tidak hanya berlaku untuk pengusaha besar dan kecil tetapi juga antara swasta dan pemerintah. Dengan demikian kebijakan yang diluncurkan akan lebih mendorong peningkatan efisiensi.

SIMPULAN

Untuk mengatasi krisis ekonomi pemerintah akhirnya meminta bantuan dari IMF yang kesepakatannya ditandatangani pada akhir Oktober 1997. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan signal pada masyarakat bahwa upaya untuk menyehatkan ekonomi akan ditangani Indonesia dengan serius. Masuknya IMF yang akan ikut dalam program penyehatan ekonomi dan akan melakukan supervisi untuk menjamin bahwa program tersebut direalisasikan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor baik internasional maupun domestik dengan lebih cepat.

Paket IMF, baik yang menyangkut dana maupun reformasi ekonomi merupakan awal atau dasar yang bagus untuk mengembangkan fun-

damental ekonomi yang sehat baik pada tingkat makro maupun mikro dan diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Meski demikian tidak berarti adanya IMF dengan semua pakatnya akan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan program pemulihan kepercayaan selain dipengaruhi oleh paket IMF juga tergantung pada kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk merealisasikan program tersebut.

Program penyelamatan ekonomi sekarang ini (dengan IMF dan bantuan bilateral) ini adalah kereta terakhir kita untuk menyehatkan ekonomi. Jika berhasil, kita dapat menyelamatkan ekonomi kita, sebaliknya kita menempatkan diri pada krisis yang berkepanjangan (ingat krisis Thailand). Oleh karena itu pemerintah sebaiknya berhati-hati terhadap kebijakan dan tindakan yang akan diambil, karena kesalahan dari sebuah kebijakan dapat berakibat serius (bahkan fatal) pada program pemulihan ekonomi pada saat ini. Jangan sampai momentum yang ada hilang. Kecermatan pengambil kebijakan menjadi lebih *urgent*, karena pada saat ini semua kebijakan yang diambil diawasi oleh masyarakat domestik dan internasional termasuk di dalamnya para analis dan *fund manager* profesional yang *well educated*, *well trained* yang mengamati dengan cermat semua kebijakan yang diambil oleh Indonesia.

Untuk itu Indonesia perlu mengembangkan reputasi yang baik dalam mengelola ekonomi makro maupun mikro yang sehat. Kebijakan yang diambil dan implementasinya harus konsisten dan transparan (meski nampaknya hal ini akan menghadapi banyak tantangan). Suatu kebijakan/tindakan yang tidak konsisten dan hanya bersifat responsif akan membahayakan misi pengembalian kepercayaan masyarakat pada manajemen ekonomi Indonesia.

Selain itu, implementasi paket IMF dan kebijakan tindak lanjutnya mesti dilakukan dengan berhati-hati karena paket kebijakan pemerintah Indonesia dengan IMF tersebut masih memiliki beberapa kelemahan untuk mengembangkan/membangun fundamental ekonomi makro

dan mikro yang sehat. Beberapa masalah dasar seperti, iklim persaingan yang sehat, pengembangan praktek bisnis yang sehat dan *good governance*, belum seluruhnya disentuh oleh paket tersebut. Dengan demikian dalam merealisasikan paket kebijakan tersebut perlu memasukkan beberapa kebijakan yang diperlukan tersebut diatas secara bertahap. Sekali lagi momentum yang ada ini jangan sampai disia-siakan.

Saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan reformasi ekonomi secara struktural. Selain untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat (harus dilakukan) juga untuk mengembangkan suatu dasar perekonomian yang kuat untuk menghadapi era pasar bersama yang mau tidak mau dan suka tidak suka harus dihadapi jika ingin ikut berkembang dalam era liberal nanti. Apalagi mengingat bahwa krisis ini baru merupakan suatu awal dari krisis-krisis yang

akan kita hadapi pada masa mendatang.

Keberhasilan program penyehatan ekonomi akan mempengaruhi prospek ekonomi dalam jangka panjang. Apabila program tersebut dijalankan dengan konsisten dan didukung oleh semua pihak diharapkan ekonomi Indonesia jangka panjang akan tumbuh lebih efisien dan sehat serta siap dalam menghadapi tantangan pasar global, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari terintegrasinya pasar dan ekonomi kita dengan pasar global. Namun demikian, melihat pengalaman negara lain seperti Finlandia dan Amerika Latin menunjukkan bahwa untuk menyehatkan ekonomi perlu waktu yang panjang, bisa mencapai 5 tahun, meski mereka sudah melakukan kebijakan yang akomodatif dan bersifat *market friendly* (Todaro, 1996). Oleh karena itu nampaknya mesti bersabar untuk melihat hasil program penyehatan ekonomi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Business Week Asian Edition*, beberapa edisi.
Far Eastern Economic Review, beberapa edisi.
 Fabozzi, Frank J., Franco Modigliani dan Michael G. Ferri, (1994), *Foundations of Financial Markets and Institutions*, Prentice Hall.
 Saunders, Anthony, (1994), *Financial Institutions Management A Modern Perspective*, Irwin.
 Todaro, Michael P., (1996), *Economic Development*, Sixth Edition, Longman.